

Selasa, 13 Desember 2011



Kericuhan terjadi saat polisi membubarkan paksa pengunjung rasa yang menggelar aksi di bundaran Tugu Degulis Untan. FOTO DELI

Pontianak, BERKAT.

Aksi demonstrasi kasus dugaan korupsi Bansos Koni Provinsi berakhir ricuh saat massa dibubarkan paksa oleh polisi, Senin (12/12) pagi, di bundaran Tugu Degulis Untan. Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan

Pemuda Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) itu digelandang ke Mapolresta Pontianak.

Belasan para demonstran terus menyuarkan aspirasiinya dengan meminta pihak kepolisian bertindak tegas terhadap kasus korupsi di Kalbar. Para pengunjung

Demo Bansos Ricuh

rasa membakar ban mobil, sehingga petugas dari kepolisian terpancing untuk membubarkan massa. Awalnya polisi menendang ban yang dibakar kearah para demonstran, sehingga para pendemo melakukan perlawanan dengan menendang balik kearah petugas.

Akibatnya kericuhan pun terjadi. Petugas yang terpancing emosi lantas membubarkan massa hingga beberapa pendemo babak belur. Mereka kemudian diamankan ke Polresta Pontianak. Polisi kemudian membongkar tenda yang dibangun Solmadapar di kawasan digulis.

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan rangkaian dari tuntutan massa atas pena

LANJUTAN BACA HAL 11

Demo Bansos Ricuhdari Hal 1

nganan kasus korupsi. Karena sejak diambil alih Polda Kalbar beberapa tahun lalu, kasus Bansos Koni Provinsi yang menelan kerugian negara Rp 22,14 miliar dari APBD Provinsi Kalbar 2006-2008 tidak menemui kejelasan. Mencakup pengeluaran keuangan Koni Kalbar oleh wakil bendahara Koni pada satgas pra PON Rp 1,368 miliar. Kasus pemberantasan korupsi ini telah lama mengendap dengan alasan klasik, menunggu surat izin presiden turun.

"Begitu garangnya Polda saat ini terhadap kasus ilegal logging. Tapi melempem saat menangani kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pejabat daerah berdasarkan hasil audit BPK yang terindikasi korupsi," kata Anton, Sekjen Solmadapar, disela-sela aksi, kemarin.

Mungkin, lanjut dia, Kepolisian tersandera berbagai kasus korupsi sehingga tidak tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Akibatnya, jumlah kerugian keuangan daerah terus membengkak. Apabila direalisasikan untuk penentasan kemiskinan dan perbaikan pendidikan maupun kesehatan.

"Polda Kalbar harus serius dan tegas dalam menuntaskan kasus korupsi dan kasus publik yang terjadi di kalbar," ungkap Anton.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum seharusnya serius dalam menangani kasus korupsi baik yang melibatkan kepala

daerah dan pejabat daerah. Selambat-lambatnya sebelum menjelang Pilgub kasus-kasus korupsi dan publik harus dibersihkan. Agar pemimpin kalbar berikutnya bebas dari kasus korupsi sebagaimana diimpikan rakyat.

"Bukan kondisi seperti sekarang ini, korupsi semakin marak. Supremasi hukum di kalbar terkesan jalan di tempat," tuturnya.

Dan yang lebih parah, lanjut Anton, bahwa korupsi tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM terberat. Mungkin negara ini adalah negara toleransi dan bukan negara hukum yang dikumandangkan para birokrat dan penegak hukum. "Penuntasan kasus korupsi terkesan lamban. Bahkan tidak adanya ketegasan dari pihak Polda untuk melakukan investigasi secara mendalam atas beberapa kasus yang tidak mendapat tindakan hukum yang jelas bahkan tervonis bebas," ungkapnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polresta Pontianak Kompol Denny Jatmiko menyatakan, pihaknya melakukan pengamanan terhadap para pendemo Solmadapar merupakan bagian dari prosedur. Karena pendemo sudah menyalahi aturan, sehingga pihak kepolisian melakukan pengamanan untuk tidak melakukan demo.

"Mereka tidak mempunyai izin. Apalagi sampai membakar ban dan mengganggu pengendara yang melintas," jelasnya. (del)